

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Guna melahirkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang menyeluruh materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia, maka keunggulan sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu aset pembangunan nasional butuh ditingkatkan secara terus menerus termasuk derajat kesehatannya.<sup>1</sup> Perkembangan peredaran narkoba dan obat-obat terlarang yang dimana hal tersebut sudah menjadi masalah yang cukup besar bagi negara. Tidak hanya orang dewasa kini narkoba tersebut sudah menjangkau anak-anak remaja, bahkan juga narkoba ini sudah tidak memandang baik itu strata sosialnya maupun jenis kelaminnya.

Kasus narkoba adalah salah satu kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Mengapa disebut seperti extraordinary crime? Karena efek kemudharatan atau kerugian yang disebabkan oleh kegiatan ini sangat luas sekali, yang mengintimidasi semua orang, baik anak-anak, orang muda atau orang tua bahkan dapat merusak satu generasi dan masa depan dari suatu negara. Saat ini di Indonesia ada 3 (tiga) kejahatan besar yang memerlukan perhatian serius, di antaranya ialah penyalahgunaan narkoba, korupsi dan terorisme. Penyalahgunaan narkoba sebenarnya menjadi sesuatu yang mengerikan apabila

---

<sup>1</sup> Natangsa Surbakti, *Buku Pegangan Kuliah; Hukum Pidana Khusus*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005, Hal. 175.

tidak kunjung ditangani, karena akibat yang dimunculkan benar-benar membahayakan.<sup>2</sup>

Pemberantasan tindak pidana narkoba melibatkan semua bangsa di dunia, akan tetapi ternyata tingkat peredaran gelap narkoba kian tinggi dan merajalela. Sejumlah indikasi memperlihatkan bahwa kejahatan narkoba ialah *extraordinary crime*. Pengertiannya ialah sebagai suatu kejahatan yang sangat berpengaruh besar dan multi dimensional tentang sosial, budaya, ekonomi dan politik serta demikian dahsyatnya dampak negatif yang diakibatkan oleh kejahatan ini. Untuk itu extraordinary punishment sangat diperlukan untuk jenis kejahatan yang sangat luar biasa dewasa ini yang sudah terjadi di seluruh bangsa-bangsa di dunia ini ni sebagai transnational crime.<sup>3</sup>

Hal tersebut dikarenakan kurangnya wawasan dan perhatian dari orang sekitar khususnya orang tua. Kurangnya perhatian oleh orang terdekat dapat menyebabkan masuknya atau dapat terpengaruhnya narkoba ini di kehidupan setiap orang. Awalnya narkoba ini merupakan ada obat penyembuhan beberapa banyak penyakit contohnya narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya, namun seiring berjalannya zaman hal ini disalahgunakan oleh segelintir orang untuk mempergunakannya untuk pribadi tanpa adanya pengawasan dari Pemerintah ( Pemerintah berwenang ).<sup>4</sup>

Narkoba merupakan narkoba, psikotropika dan bahan adiktif. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang nomer 35 tahun 2009 tentang narkoba,

---

<sup>2</sup> Nita Ariyulinda, *Hukuman Mati Narapidana Narkoba Dan Hak Asasi Manusia*, <https://rechtsvinding.bphn.go.id>, Diakses 28 Oktober 2018

<sup>3</sup> A. Kadarmantha, *Kejahatan narkoba: Extraordinary Crime Dan Extraordinary Punishment*, <http://kejahatan-narkoba-extraordinary-crime.html>, Diakses 28 Oktober 2018

<sup>4</sup> Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya*, (Jakarta :esensi, 2006), Hal. 10.

narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika, Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Sedangkan Zat adiktif disini adalah bahan/zat bukan Narkotika & Psikotropika seperti alkohol/etanol atau metanol, tembakau, gas yang dihirup (inhalansi) maupun zat pelarut (solven).<sup>5</sup>

Secara terminologis narkoba adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.<sup>6</sup> Tidak bisa dipungkiri bahwa narkoba ini telah menyebabkan rusaknya pikiran, moral dan bahkan tingginya angka kejahatan yang terdapat di masyarakat.

Persoalan narkoba ini sebenarnya bukanlah hal yang baru lagi penyalahgunaan narkoba di Indonesia saat ini sudah pada masa yang membahayakan, Penyalahgunaan narkoba biasanya diawali dengan pemakaian pertama pada usia Sekolah Dasar (SD) atau Sekolah Menengah Pertama (SMP), akibat tawaran, rayuan, dan tekanan seseorang atau teman seusia. Disebabkan pula oleh rasa ingin tahu dan rasa ingin mencoba, mereka menerima tawaran

---

<sup>5</sup> Ismawati Septiningsih, S.H., M.H. *Bahaya Narkoba Dikalangan Pelajar dan Upaya Penanggulangannya*, <http://Medianeliti.com>, diakses 6 Maret 2019

<sup>6</sup> Anton M. Mulyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), Hal. 609.

tersebut. Kemudian akan dengan mudahnya untuk dipengaruhi menggunakan lagi, yang pada alhasil menyandu obat-obatan terlarang dan ketergantungan pada obat-obatan terlarang.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang makin merajalela tidak luput dari salah satu ciri barang tersebut yakni melahirkan adiksi (ketagihan) yang mengganggu dalam pengertian penggunaan tidak untuk pengobatan dan secara ilegal. Dari pandangan masyarakat yang rentan dengan masalah narkoba terarah pada kelompok generasi muda suatu bangsa, mereka adalah target narkoba oleh karena itu negara di dunia ini dengan segala cara dan kemampuannya untuk memberantas tindak pidana narkoba yang dampaknya merusak ekonomi, politik dan kestabilan negara. Secara kualitas semakin banyak jenis narkoba yang disalahgunakan atau yang diedarkan secara gelap di Indonesia mulai dari morfin, heroin, ganja dan sebagainya yang secara kualitas makin banyak yang disalahgunakan atau diedarkan secara gelap. Secara kuantitas tidak dapat dipungkiri kejahatan narkoba, zat adiktif semakin meningkat akhir-akhir ini.<sup>7</sup>

Di Indonesia, seperti juga di negara-negara lainnya, organisasi kejahatan narkoba, baik lokal maupun asing, terus-menerus meningkatkan kegiatan ilegalnya, karena keuntungan-keuntungan dari aktivitas-aktivitas ilegal ini sangat besar dan masalah ini menimpa hampir seluruh tingkat masyarakat. Pihak kepolisian mengungkapkan bahwa Indonesia tidak lagi menjadi area atau daerah transit perdagangan narkoba tetapi telah menjadi target utama para pengedar, yang berdampak semakin banyak jenis dan jumlah narkoba yang

---

<sup>7</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme Dan Abolitionisme*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, Hal. 204.

beredar. Mulai dari produsen, pengedar dan pemakai (korban) ada salah satu jenis kriminalitas yang sangat berat, apalagi sebagai korban jumlahnya semakin berkembang setiap tahun termasuk di Indonesia.

Di Indonesia sudah cukup lama (sejak tahun 1960 an) berjuang memberantas penyalahgunaan narkoba baik melalui Undang-undang (hukum) maupun penegakan hukum melalui peradilan.<sup>8</sup> Pemerintah juga terus meningkatkan usahanya dalam rangka memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba secara bertanggungjawab. Berbagai cara telah dilakukan dari sifatnya pencegahan, penegakan hukum maupun terapi dan rehabilitasi terhadap korban serta upaya lainnya, seperti pelatihan untuk para penegakan hukum.

Indonesia memasuki era perdagangan bebas, sehingga narkoba dengan mudah masuk ke Indonesia. Zaman globalisasi memberikan pengaruh pada kehidupan manusia baik pengaruh yang positif seperti memberikan suatu kemudahan dalam berhubungan yaitu lewat alat-alat komunikasi, maupun pengaruh yang negatif seperti banyaknya para generasi muda yang terjerumus kedalam pergaulan bebas dan pemakaian obat-obatan terlarang seperti halnya narkoba. Di akhir 2017 sendiri menurut data yang didapat dari Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sekitar 3.376.115 orang yang terdiri pada kelompok usia yakni 10-59 tahun dalam setahun terakhir 2017. Namun pada tahun 2018 ini telah naik yang pada tahun 2017 1,7 % menjadi 2,1 %. Menurut kepala BNN,

---

<sup>8</sup> C.S.T. Cansil, *Lembaga Hukum Dan Politik, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia*, Jakarta, 2004, Hal. 11.

Komisaris Jendral Polisi (Komjenpol) Heru Winarko menyatakan tahun 2018, para pengguna narkoba rata-rata merupakan generasi muda atau para pelajar.<sup>9</sup>

Keberadaan Undang-Undang Psikotropika yaitu Undang-Undang nomer 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan perubahan dengan amandemen dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana narkoba. Pembentukan Undang-Undang diharapkan dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dengan menggunakan sarana hukum pidana / penal.<sup>10</sup>

Tindakan penyalahgunaan narkoba kali ini tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, namun sudah terang-terangan yang dilakukan oleh para pemakai dan pengedar ketika melakukan operasi barang berbahaya itu. Dari fakta yang dapat disaksikan hampir setiap hari baik dengan media cetak atau dengan elektronik, ternyata barang haram tersebut sudah merajalela kemana-mana tanpa pandang bulu, terutama dimasa generasi remaja yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam mengembangkan negara dimasa mendatang. Disisi lain yang cukup mengesankan dalam pertumbuhan masalah narkoba dunia ialah cara untuk menumbuhkan penanggulangan masalah narkoba tidak hanya pada hal ketersediaan (supply), namun juga dari hal permintaan (demand). Ditinjau dari aspek kepentingan nasional, konvensi ini dapat melindungi kepastian dan keadilan hukum dalam

---

<sup>9</sup> Berita Tribun, *Sepanjang Tahun 2018 Mayoritas Pengguna Narkoba Adalah Generasi Muda*, <http://www.tribunnews.com>, diakses 31 Desember 2018

<sup>10</sup> H. Siswanto, S, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2012), Hal. 60.

cara penegakan hukum peredaran gelap narkoba dan psikotropika yang menyangkut para pelaku kejahatan lintas batas teritorial Indonesia. Disamping itu, guna kepentingan nasional terutama kepentingan dalam negeri, akan dihasilkan suatu kepastian dan kemanfaatan dalam rangka pengaturan peredaran narkoba dan psikotropika guna kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.<sup>11</sup>

BNN adalah lembaga penyidik dalam tindak pidana narkoba dan lembaga ini dibantu oleh pihak dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), yang pada mulanya penyidik dari kasus narkoba ini merupakan dari pihak kepolisian, namun kepolisian sesudah dikeluarkannya UU 35 Tahun 2009 tentang Narkoba semata-mata berperan menjadi penyidik pembantu BNN. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada presiden melalui Kepala Kepolisian Republik Indonesia.<sup>12</sup>

Menurut pasal 4 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi bahwa: Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selain polisi ada juga peran BNN dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana narkoba ini. Di dalam pasal 2 Peraturan Presiden No.23 tahun 2010 tentang Badan Narkoba Nasional, dalam tugasnya disebutkan BNN mempunyai wewenang untuk

---

<sup>11</sup> Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum dalam kajian Sosiologis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, Hal 1.

<sup>12</sup> Badan Narkoba Nasional, *Pedoman Petugas Penyuluhan P4GN Dilingkungan Hukum*, (Jakarta;Badan Narkoba Nasional,2009), Hal. 24.

mencegah dan memberantas narkoba dan berkoordinasi dengan POLRI dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba.

Menurut pasal 71 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam hal melakukan pemberantasan narkotika yang berbunyi : “BNN diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan, peredaran narkotika, dan prekursor narkotika” disertai dengan kewenangan yang diberikan kepada penyelidik dan penyidik BNN. Sedangkan wewenang oleh penyidik POLRI tercantum juga pada pasal 81 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, tetapi penyidikan yang dilakukan oleh POLRI secara umum terdapat dalam pasal 7 Undang-Undang Nomer 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan juga terdapat pada pasal 16 (1) undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang isinya diatur sanksi hukumnya, serta hal-hal yang diperbolehkan dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut, maka penyidik diharapkan dapat mendukung proses penanganan perkara kepada seseorang atau lebih yang sudah pernah melakukan tindak pidana narkoba dewasa ini. Efektivitas berlakunya Undang-undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak hukum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung, yakni penyidik Polri, BNN, serta para penegak hukum.<sup>13</sup>

Berdasarkan fakta pada tahun 2018, di Kalimantan Selatan yang beribukotakan Banjarmasin, menurut Badan Narkotika Nasional Provinsi tercatat

---

<sup>13</sup> Barda Narwawi Arif, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, Hal. 14.



menduduki peringkat 5 besar se-Indonesia.<sup>14</sup> Mengenai narkoba ini merupakan jaringan terbesar di Indonesia, dalam penerapan pengungkapan kasus narkoba ini terbilang benar-benar unik, tampak sejak sistem transaksi yang dilakukan dengan kejahatan yang dilakukan yaitu kejahatan yang kerap disebut oleh pihak kepolisian dengan kejahatan sel terputus, dimana si pengedar dan si pengguna tidak sama-sama mengenal satu sama lain, terlebih dalam transaksinyapun dilakukan melalui komunikasi, tanpa bertatap muka dan dilakukan secara diam-diam. Sehingga masalah ini yang menjadi kesulitan selama pengungkapan tindak pidana narkoba. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pengungkapan Tindak Pidana Narkoba Oleh Penyidik.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana strategi pengungkapan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh penyidik Polresta Banjarmasin dan BNN Kota Banjarmasin ?
2. Kendala apa saja yang dihadapi oleh penyidik Polresta Banjarmasin dan BNN Kota Banjarmasin ketika mengungkap tindak pidana narkoba dan solusi seperti apa untuk mengatasi kendala tersebut ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui strategi pengungkapan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh penyidik ?

---

<sup>14</sup> M. Robby, *Pengguna Narkoba di Kalsel Masuk 5 Besar*, <https://kumparan.com>, diakses 2 Maret 2019

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh penyidik ketika mengungkap tindak pidana narkoba dan solusi seperti apa untuk mengatasi kendala tersebut

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat bagi Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Penulis dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dan mengembangkan pengetahuan ilmu hukum tentang UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, UU Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan bagaimana strategi penyidik dalam mengungkap tindak pidana narkoba

- b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam rangka pelaksanaan strategi pengungkapan tindak pidana narkoba.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penulis dalam penelitian ini yaitu, penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya pada bidang Hukum Pidana khususnya pada Narkoba Nomor 35 Tahun 2009

mengenai Strategi Pengungkapan Tindak Pidana Narkoba. Selain itu, penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam sebuah penelitian diperlukan sebuah metode yang mendukung tercapainya tujuan penelitian. Menurut Muhidin Sirat, metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data penelitiannya, Kesimpulannya bahwa metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mengumpulkan data yang di perlukan dalam penelitian dengan menggunakan cara atau proses tertentu.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini metode yang digunakan antara lain sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis sosiologis. Yuridisnya dalam penelitian ini adalah hukum yang berkaitan dengan narkoba. Sedangkan secara sosiologisnya adalah tentang Strategis Pengungkapan Tindak Pidana Narkoba oleh Polresta Banjarmasin dan BNN Kota Banjarmasin

### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Kota Banjarmasin khususnya di Polresta Banjarmasin yang beralamat di Jl. Jendral A. Yani Km 3,5, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin dan BNN Kota Banjarmasin yang beralamt di Jl. Pangeran Hidayatullah, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin

---

<sup>15</sup> Metode Penelitian menurut para Ahli, <https://ibnudin.net/metode-penelitian-metodologi-penelitian/>. Diakses 28 Oktober 2018.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis yaitu :

#### a. Data Primer

Sumber Data Primer diperoleh langsung dari lapangan yang bersumber dari Aparat Kepolisian yang beralamat di Jl. Jendral A. Yani Km 3,5, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin dan BNN yang beralamat di Jl. Pangeran Hidayatullah, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin mengenai Strategis Pengungkapan Tindak Pidana Narkoba oleh Penyidik

#### b. Data Sekunder

Sumber Data Sekunder digunakan sebagai data pelengkap yang mendukung sumber data sekunder. Sumber data sekunder diperoleh dari berbagai literature, dokumen-dokumen, tulisan, buku, arsip, majalah, Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang nomer 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Presiden Nomer 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional

### 3. Teknis Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh Peneliti adalah sebagai berikut

#### a. Pengamatan

Pengamatan dilakukan secara langsung oleh penulis pada objek penelitian tentang Pelaksanaan Strategi Pengungkapan Tindak Pidana

Narkoba yang dilakukan oleh Penyidik Polresta Banjarmasin dan BNN Kota Banjarmasin

b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan dan mengumpulkan informasi melalui tanya jawab serta diskusi kepada pihak yang memiliki korelasi terhadap masalah yang diteliti yaitu anggota Polresta Banjarmasin yang bernama Iptu Sahri selaku Kaurbinops Satresnarkoba dan staff BNN Kota Banjarmasin yang bernama Bripka Harrykson Siburian, SH selaku Penyidik Narkoba yang mengetahui tentang Strategi Pengungkapan Tindak Pidana Narkoba

c. Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan teknik pengumpulan data secara tidak langsung dari literatur, buku, majalah arsip atau berita cetak maupun melalui media elektronik.

5. Teknik Analisa Data

Analisa data di dalam penelitian ini dilakukan dengan deskriptif kualitatif yakni data yang berkaitan dengan Strategi Pengungkapan Tindak Pidana Narkoba oleh Penyidik yang kemudian dianalisa secara deskriptif

**G. Sistematika Penulisan**

Secara garis besar sistematika penulisan yang ada pada prosoposal penelitian ini, penulis memberikan gambaran umum serta membaginya pada beberapa bagian BAB dengan sistematika yaitu :

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini menguraikan latar belakang yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diangkat oleh peneliti, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan dari penelitian sehingga memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini menguraikan definisi dan teori teori yang berkaitan dengan tema utama dari penelitian yang dilakukan. Teori teori dalam tinjauan pustaka digunakan sebagai landasan atas pemecahan masalah mengenai Strategi Pengungkapan Tindak Pidana Narkoba ( Studi di Wilayah Hukum Kota Banjarmasin).

## **BAB III : PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis akan memaparkan, menguraikan dan menganalisa terkait dengan permasalahan yang diteliti yaitu Strategi Pengungkapan Tindak Pidana Narkoba ditinjau dari UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

## **BAB IV : PENUTUP**

Pada bab ini terdapat kesimpulan serta saran yang menjadi bab terakhir dari penelitian ini, kesimpulan pada bagian ini menjadi kesimpulan akhir yang berisi pemikiran, pendapat serta solusi atas

penelitian yang dilakukan. Saran dan hasil penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang terkait dalam penelitian ini.

